

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak –pihak eksternal entitas pemda kabupaten, kota, atau provinsi (Sujarweni, 2015).

Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan publik menjadi aspek yang semakin penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai indikator utama dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Laporan yang berkualitas tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan, tetapi juga menjadi alat bagi pengambil keputusan, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk menilai pengelolaan sumber daya daerah secara efektif (Mardiasmo, 2018).

Menurut Yosefrinaldi (2013), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat penting.

Sehingga harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan. Menurut Yosefrinaldi (2013), dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Selain sumber daya manusia, efektivitas standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dalam Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (Ardianto dan Eforis, 2019).

Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain (PP 71Tahun 2010) masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, Lembaga pemeriksa,

pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Kegunaan atau kebermanfaatan (*usefulness*) dapat ditentukan secara kualitatif. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Selain wajib untuk efektifitas standar akuntansi pemerintahan, ada juga Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern mencakup semua proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (Armando, 2013).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berarti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Ada empat opini yang diberikan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hasil pengawasan kualitas akuntabilitas keuangan daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hal itu ditunjukkan dengan adanya peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI) serta peningkatan indikator-indikator pengelolaan program lintas sektoral. Ukuran akuntabilitas pelaporan keuangan ditunjukkan dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK RI) atas penyajian laporan pemerintah. Hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 Sumatera Barat sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada 19 pemerintah kabupaten/ kota di Sumatera Barat yang telah menerima LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan). Sebanyak 12 kabupaten dan 7 kota, menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dari 19 pemerintahan kabupaten/kota yg mendapat WTP sekitar 100% yang tidak mendapat WTP sekitar 0% (<https://sumbar.bpk.go.id/>).

Berdasarkan pada opini audit BPK di wilayah pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota Padang. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat serta mengukur kinerja pemerintah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dampak dari laporan keuangan yang tidak berkualitas akan mempengaruhi informasi laporan keuangan yang disajikan serta pengambilan keputusan, oleh karena itu keandalan informasi keuangan, relevansi informasi keuangan, komparatif informasi keuangan, dan pemahaman informasi keuangan dalam menyusun laporan keuangan merupakan faktor penting terhadap laporan keuangan yang berkualitas.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, Menurut purba et al (2021) penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Menurut Safitri (2021) penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Penelitian yang di lakukan oleh Widaryani (2020) menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian yang di lakukan oleh Wuriasih (2019) menunjukkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penggunaan informasinya pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah informasi pelaporan.

Penelitian yang di lakukan oleh Novtania (2017) menunjukkan hasil penelitian ini Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki sebuah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Kota Padang karena adanya pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Purba et al (2021) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo)”. Perbedaan yang terjadi yaitu penulis memfokuskan pada penelitian daerah Kota Padang dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), dan SPIP (sistem pengendalian internal Pemerintahan).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang**”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kota Padang, yang merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap tingkat kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD Kota Padang?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap tingkat kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD Kota Padang?

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berpengaruh terhadap tingkat kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD Kota Padang?
4. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berpengaruh terhadap tingkat kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD Kota Padang.
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD Kota Padang.
3. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD Kota Padang.
4. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap literatur akuntansi sektor publik, agar dapat lebih mengembangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota. Dengan memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, penelitian ini dapat memperkaya teori dan konsep seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen keuangan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan data empiris dan rekomendasi tentang bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berpengaruh. Selain itu, akan menjadi referensi bagi para akademisi dan peneliti yang akan datang dalam bidang yang sama. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Padang dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kinerja proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPKAD Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tugas akhir adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

laporan keuangan pemerintahan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang. bab ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, antara lain teori pendukung dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian berisikan tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang. bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisikan tentang gambaran umum objek penelitian dan pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis.

BAB V : Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran.